



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 700/Kep. 15 -Inspektorat/2011

Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Sumedang akan melakukan pemeriksaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengawasan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7));
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 2);

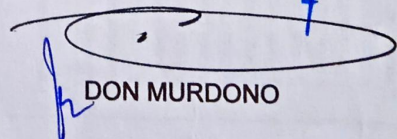
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Sumedang;
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 dengan daftar Program Kerja dan Jadwal Program Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan materi audit sebagai berikut :
- a. aspek keuangan;
 - b. aspek SDM/Kepegawaian;
 - c. aspek tugas pokok dan fungsi;
 - d. aspek metoda kerja;
 - e. aspek sarana dan prasarana.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SUMEDANG,


DON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 3. Yth. Kepala SKPD se-Kabupaten Sumedang.
-

DAFTAR PROGRAM KERJA DAN JADWAL PENGAWASAN

I. Program Kerja Pengawasan :

[illegible]

NO	URUTAN	PEMERIKSAAN/ TINDAKLANJUT	OBJEK PEMERIKSAAN / TINDAKLANJUT	SASAKAN PEMERIKSAAN/ TINDAKLANJUT	PELAKSANA	/TIM	HARI	HP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e. Desa Margamukti f. Desa Mekarjaya g. Desa Jatimulya h. Desa Jatihurip i. Desa Kebonjati j. Desa Rancamulya 3. Kecamatan Tomo dan Desa : a. Desa Cicarmanah b. Desa Cipeles c. Desa Dermawangsi d. Desa Jemberwangi e. Desa Marongge f. Desa Tolengas g. Desa Tomo h. Desa Karyamukti i. Desa Bugel 4. Kecamatan Ganeas dan Desa : a. Desa Cikongeng b. Desa Sukawening c. Desa Dayeuhluhur d. Desa Ganeas e. Desa Sukaluyu f. Desa Tanjunghurip g. Desa Cikondang		IRBAN WIL	7	12	84	
			B. Pemutahiran/Tindakanlanjutan Pemutahiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 obrik)	B. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2009 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2009.	SEKRETARIAT	10	14	140	
4	IV	April 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL	7 7 7 7	12 12 12 12	84 84 84 84	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang belum dipenksa 2. Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan yang belum di tindak lanjuti
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 2 sasaran)	B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi	IRBAN WIL/ SEKRETARIAT	PM	PM	PM	
			C. Pemutahiran/Tindakanlanjutan Pemutahiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 obrik)	C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2010	SEKRETARIAT	10	12	120	

NO	Tgl	PEMERIKSAAN/ TINDAKLANJUT	SUBSTANSI PEMERIKSAAN / TINDAKLANJUT				SASARAN PEMERIKSAAN/ TINDAKLANJUT				PELAKSANA				HARI	HP	KETERANGAN	
			4				5				6							
1	2	3	4				5				6				7	8	9	10
5	V	Mei 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pekerjaan Umum				A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja				IRBAN WIL IRBAN WIL				14	14	196	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang belum di tindak lanjut
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 2 sasaran)				B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi				IRBAN WIL/ SEKRETARIAT				PM	PM	PM	
			C. Pemutakhiran/Tindak lanjut Pemutakhiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 objek)				C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2010				SEKRETARIAT				10	12	120	
6	VI	Jun 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Badan Lingkungan Hidup 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kehutanan dan Perikanan 4. Dinas Peternakan dan Perikanan				A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja				IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL				7 7 7 7	12 12 12 12	84 84 84 84	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang belum diperiksa 2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang belum di tindaklanjuti
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)				B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi				IRBAN WIL/ SEKRETARIAT				PM	PM	PM	
			C. Pemutakhiran/Tindak lanjut Pemutakhiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 objek)				C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2009 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2009				SEKRETARIAT				10	12	120	
7	VII	Juli 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Bagian lingkup Asisten Administrasi 2. Bagian lingkup Asisten Perencanaan 3. Bagian lingkup Asisten Pemerintahan 4. Sekretariat DPRD				A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja				IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL				7 7 7 7	12 12 2 12	84 84 14 84	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang belum diperiksa 2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang belum di tindaklanjuti
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)				B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi				IRBAN WIL/ SEKRETARIAT				PM	PM	PM	
			C. Pemutakhiran/Tindak lanjut Pemutakhiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 objek)				C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2010.				SEKRETARIAT				10	12	120	
8	VIII	Agustus 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2. Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja				IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL				7 7 7 7	12 12 12 84	84 84 84 84	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang belum diperiksa 2. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan yang belum di tindaklanjuti
											IRBAN WIL				7	12	84	
															7	12	84	

No		TINDAKLANJUT		KETERANGAN		TINDAKLANJUT		TINDAKLANJUT		TINDAKLANJUT		TINDAKLANJUT		TINDAKLANJUT		TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)	B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi	IRBAN WIL SEKRETARIAT	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			C. Pemutakhiran/Tindaklanjutan Pemutakhiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 obyek)	C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2010.	SEKRETARIAT	10	12	120									
9	IX	September 2011	A. Pemeriksaan Reguler 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	A. 1. Aspek Tupoksi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL IRBAN WIL SEKRETARIAT	7 7 7 7 7 7 PM	12 12 12 12 12 12 PM	84 84 84 84 84 84 PM	1. Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang belum diperiksa 2. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum di tindak lanjuti								
			B. Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)	B. Masalah Khusus/Kasus yang terjadi	SEKRETARIAT	10	12	120									
			C. Pemutakhiran/Tindaklanjutan Pemutakhiran atas Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 (untuk 6 obyek)	C. 1. Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2010 2. Kasus yang terjadi yang telah di periksa Tahun 2010.	SEKRETARIAT	10	12	120									
10	X	Oktober 2011	Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)	Masalah Khusus/Kasus yang terjadi	IRBAN WIL SEKRETARIAT	PM	PM	PM									
11	XI	November 2011	Pemeriksaan Khusus/Kasus (untuk 3 sasaran)	Masalah Khusus/Kasus yang terjadi	IRBAN WIL SEKRETARIAT	PM	PM	PM									
12	XII	Desember 2011	---	---	IRBAN WIL SEKRETARIAT	PM	PM	PM									

NO	BULAN	AUDITAN	PELAKSANA	HR	ORG
1	2	3	4	5	6
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH					
I. PEMERIKSAAN REGULER					
1	JANUARI	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Pertininan	Irbian Will	14	7
		Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanian	Irbian Will	14	7
		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Irbian Will	14	7
		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Irbian Will	14	7
2	MARET	Kecamatan Cimanggung dan Desa :	Irbian Will	12	7
		1. Desa Mangunarga			
		2. Desa Sawahdadap			
		3. Desa Sukadana			
		4. Desa Cikahuripan			
		5. Desa Cihanjuang			
		6. Desa Sindanggalih			
		7. Desa Sindangpakuon			
		8. Desa Cimanggung			
		9. Desa Tegalmanggung			
		10. Desa Sindulang			
		11. Desa Pasimanjung			
		Kecamatan Sumedang Utara dan Desa :	Irbian Will	12	7
		1. Desa Simamulya			
		2. Desa Girimukti			
		3. Desa Padasuka			
		4. Desa Mulyasari			
		5. Desa Margamukti			
		6. Desa Mekarjaya			
		7. Desa Jatimulya			
		8. Desa Jatihurip			
		9. Desa Kebonjati			
		10. Desa Rancamulya			
		Kecamatan Tomo dan Desa:	Irbian Will	12	7

	3	4	5	6
	2. Desa Cipeles			
	3. Desa Darmawangi			
	4. Desa Jembarwangi			
	5. Desa Marongge			
	6. Desa Tolengas			
	7. Desa Tomo			
	8. Desa Karyamukti			
	9. Desa Bugel			
	Kecamatan Ganeas dan Desa :			
	1. Desa Cikongeng	Irbab V'ilil	12	7
	2. Desa Sukawening			
	3. Desa Dayeuhluhur			
	4. Desa Ganeas			
	5. Desa Sukaluyu			
	6. Desa Tanjunghurip			
	7. Desa Cikondang			
3 APRIL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Irbab V'ilil	12	7
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Irbab V'ilil	12	7
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Irbab V'ilil	12	7
	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	Irbab V'ilil	12	7
4 MEI	Dinas Pendidikan	Irbab V'ilil	14	14
	Dinas Pekerjaan Umum	Irbab V'ilil	14	14
5 JUNI	Badan Lingkungan Hidup	Irbab V'ilil	12	7
	Dinas Kesehatan	Irbab V'ilil	12	7
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Irbab V'ilil	12	7
	Dinas Peternakan dan Perikanan	Irbab V'ilil	12	7
6 JULAI	Bagian lingkup Asisten Administrasi	Irbab V'ilil	12	7
	Bagian lingkup Asisten Pembangunan	Irbab V'ilil	12	7
	Bagian lingkup Asisten Pemerintahan	Irbab V'ilil	12	7
	Sekretariat DPRD	Irbab V'ilil	12	7

1	2	3	4	5	6
7 AGUSTUS	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Irban Wil	12	7
	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		Irban Wil	12	7
	Badan Kepegawaian Daerah		Irban Wil	12	7
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Irban Wil	12	7
8 SEPTEMBER	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		Irban Wil	12	7
	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		Irban Wil	12	7
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Irban Wil	12	7
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Irban Wil	12	7
II PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS					
1 FEBRUARI	Pemeriksaan Kasus/Khusus (6 buah)		Irban/Sekretariat		
2 APRIL	Pemeriksaan Kasus/Khusus (2 buah)		Irban/Sekretariat		
3 MEI	Pemeriksaan Kasus/Khusus (2 buah)		Irban/Sekretariat		
4 JUNI	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
5 JULI	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
6 AGUSTUS	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
7 SEPTEMBER	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
8 OKTOBER	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
9 NOVEMBER	Pemeriksaan Kasus/Khusus (3 buah)		Irban/Sekretariat		
III REVIU LAPORAN KEUANGAN					
1 FEBRUARI	Reviu Laporan Keuangan Daerah				
IV TINDAKLANJUT TEMUAN REGULER					
1 JANUARI	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	14
2 MARET	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	14
3 APRIL	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
4 MEI	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
5 JUNI	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
6 JULI	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
7 AGUSTUS	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
8 SEPTEMBER	Tindaklanjuti temuan (6 buah)		Sekretariat	10	12
V TINDAKLANJUT TEMUAN BPK					
1	Tindaklanjuti temuan BPK		Sekretariat		

NO	AUDITAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2011												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
		I II III IV I	II III IV I	I II III IV I	II III IV I	I II III IV I	II III IV I	I II III IV I	II III IV I	I II III IV I	II III IV I	I II III IV I	II III IV I	
1	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	REG	RLK BPK 1	BPK 2										
2	Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan	REG	RLK BPK 1	BPK 2										
3	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	REG	RLK BPK 1	BPK 2										
4	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	REG	RLK BPK 1	BPK 2										
5	Kecamatan Cimanggung dan Desa		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
6	Kecamatan Sumedang Utara dan Desa		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
7	Kecamatan Tomo dan Desa		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
8	Kecamatan Ganeas dan Desa		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
10	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
12	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana		RLK BPK 1	BPK 2 REG										
13	Dinas Pendidikan		RLK BPK 1	BPK 2	REG									
14	Dinas Pekerjaan Umum		RLK BPK 1	BPK 2	REG									
15	Badan Lingkungan Hidup		RLK BPK 1	BPK 2		REG								

	Bulan												KETERANGAN
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
32 Kantor Arsip					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
33 Satpol PP					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
34 PDAM													
35 RSUD					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
36 Kantor Perpustakaan Daerah					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
37 Kecamatan Pamulihan					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
38 Kecamatan Sukasari					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
39 Kecamatan Sumedang Selatan					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
40 Kecamatan Tanjungmedar					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
41 Kecamatan Paseh					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
42 Kecamatan Ujungjaya					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
43 Kecamatan Wado					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
44 Kecamatan Damaraja					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
45 Kecamatan Jatinangor					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
46 Kecamatan Tanjungsari					RLK			BPK 2					
					BPK 1								
47 Kecamatan Cimelaka					RLK			BPK 2					
					BPK 1								

